

POSISI STRATEGIS INDONESIA DALAM PERDAGANGAN ASEAN: SEBUAH TINJAUAN EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL

Hilmi Rahman Ibrahim

Dosen Tetap Pada Departemen Hubungan Internasional

FISIP-Universitas Nasional

email : hilmi_rahman69@yahoo.com

ABSTRAK

Diawal tahun 1990-an, keberadaan Indonesia dalam keanggotaan perdagangan Asean merupakan sebuah tahapan konsolidasi dalam menghadapi persaingan perdagangan antar kawasan yang menjadi fenomena global saat itu. Sepanjang tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an persaingan regional perdagangan antar kawasan sangat mewarnai perkembangan ekonomi dan bisnis internasional saat itu. Kini, Asean yang awalnya sebagai forum kerjasama ekonomi dan sosial, lebih memfokuskan diri pada kerjasama di sektor perdagangan, ditandai dengan deklarasi bersama anggota negara Asean dan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun 2015 awal tahun 2016 lalu. Deklarasi dan pemberlakuan prinsip perdagangan dalam kerangka (MEA) jelas menjadi pintu utama bagi setiap negara di Asean untuk berkompetisi secara sehat dalam merebut dan mengisi pasar Asean yang dua pertiga *demandnya* berada di Indonesia. Bagi Indonesia, persaingan perdagangan Asean jelas merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang yang sangat penting. Menjadi tantangan manakala Indonesia kurang mampu mengungguli produk-produk negara Asean lainnya, dan sebaliknya menjadi peluang, jika Indonesia mampu merebut dan memenangkan kompetisi, tentu dengan segala keunggulan (competitiveness) yang dimiliki. Oleh karena itu, bagi Indonesia memenangkan persaingan dalam kerangka perdagangan Asean bukan hal gampang, tapi membutuhkan dukungan regulasi yang memadai dari pemerintah, pemanfaatan teknologi serta memperkuat daya saing dan inovasi produk yang lebih baik dan kompetitif. Dukungan sumber daya alam dan faktor posisi geografis Indonesia di kawasan Asean, sangat menguntungkan selain karena lintasan serta arus dan distribusi perdagangan juga karena ketersediaan sarana pendukung transportasi laut yang sangat mendukung. Peluang ini menjadi nyata kalau seluruh kekuatan sumberdaya yang dimiliki oleh Indonesia dioptimalkan sebaiknya dan sebaliknya Indonesia akan menjadi sasaran empuk bagi pasar negara-negara Asean lainnya jika tidak bisa kompetitif.

Kata kunci : faktor strategis, persaingan dan daya saing.

ABSTRACT

Regionalism in international relations has been a contemporary phenomenon since the world entered its 20th century. In Southeast Asia, Indonesia as one member of ASEAN has managed consolidating the country's position in trade cooperation and competition. With By setting up its economic community of MEA in 2015, ASEAN has focused on trade cooperation sector. Given the strategic position of Indonesia where two third of ASEAN

demands for goods and services are supplied by Indonesia, the setting up of ASEAN economic community (MEA) is crucial for individual members to compete and cooperate. How would Indonesia take this opportunity? The paper discusses the factors that need more attention in such areas as government regulation, technology, competitiveness, and innovation. While natural resources and Indonesia's strategic position in terms of geography and trade route are there to exist, those factors will determine whether Indonesia will be the winner or the loser.

Keywords : regionalism, strategic factors, cooperation, competition, competitiveness.

1. Pendahuluan

Memasuki Abad ke 20, dunia internasional ditandai dengan perubahan isu internasional yang luar biasa, dari persaingan politik menjadi persaingan ekonomi internasional berbasis kawasan. Perubahan ini ditandai dengan muncul dan berkembangnya regionalisasi ekonomi di berbagai kawasan, tidak terkecuali kawasan Asia Pasifik, dan kawasan Asean. Isu utama terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi dan perdagangan seiring dengan meningkatnya interdependensi global antar negara dan regionalisme ekonomi.

Hampir di setiap kawasan terdapat blok ekonomi dan perdagangan yang menyebutkan identitas regionalnya seperti *European Economic Community (EEC)*, *Latin America Free Trade Area (LAFTA)*, *North Amerika Free Trade Area (NAFTA)*, *Asean Free Trade Area (AFTA)* *Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)*, dan lain-lain. Di samping itu penguatan fungsi organisasi atau lembaga internasional yang mengatur jalannya sistem perekonomian global semakin berperan penting antara lain: *World Trade Organization (WTO)*, *International Monetary Fund (IMF)*, *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*, *Organization Petroleum Exporting Countries (OPEC)*, *Organization for Economic and Development (OECD)*.

Keberhasilan kerjasama ekonomi dari sistem internasional yang mengutamakan pemerintahan demokratis di negara-negara Barat telah berhasil melepaskan diri dari adanya *common threat* (ancaman bersama), yaitu ancaman dan pengaruh ideologi komunisme. Berkurangnya faktor ancaman tersebut menunjukkan perkembangan dan kerjasama ekonomi yang kuat termasuk penanganan keterkaitan independensi ekonomi yang menjadi gejala utama di hampir setiap kawasan.

Globalisasi dan sistem ekonomi internasional memperkuat peranan neoliberalisme dengan menempatkan pasar bebas sebagai kekuatan utama. (*mainstream*). Akibatnya, negara-negara dituntut untuk mampu mengakomodasi sistem tersebut dengan mengintegrasikan ekonomi nasionalnya menuju keterbukaan tata perekonomian dunia baru berdasarkan liberalisasi ekonomi. Hal ini diikuti dengan munculnya berbagai kesepakatan internasional di bidang ekonomi regional dan perdagangan berbasis kawasan dan geostrategis

Regionalisasi ekonomi dan perdagangan juga ditandai dengan persaingan antar kawasan dengan menghilangkan bentuk pemberian subsidi, kuota, lisensi, monopoli, serta tata niaga. Dalam konteks globalisasi dan liberalisasi di kawasan regional ASEAN, disepakati perjanjian yang akan meliberalisasi pasar dalam negeri

secara signifikan. Perjanjian ini dikenal dengan ASEAN Free trade Area (AFTA) yang telah disepakati oleh anggota negara ASEAN, melalui forum pertemuan kepala Negara ASEAN atau ASEAN *Summit* ke-4 tahun 1992.

Tuntutan dan dinamika ekonomi regional mendorong perjanjian Asean summit ke 4 direvisi pada tahun 2007 dengan masuknya Cina pada tahun 2012 menjadi ASEAN-Cina Free trade Area (ACFTA) dan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Kerjasama ini dilakukan untuk menjadikan kawasan ASEAN basis produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global dan menarik lebih banyak Foreign Direct Investment (FDI) serta meningkatkan perdagangan antar negara-negara ASEAN (intra-ASEAN Trade).

Transformasi ini telah mendorong era baru dalam membangun kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya masyarakat ASEAN. Seluruh masyarakat didorong menuju integrasi internasional untuk lebih memperluas hubungan dan kerjasama antar bangsa dunia. Pasar bebas merupakan dampak yang mengikuti globalisasi negara-negara ASEAN, dimana masyarakat ASEAN didorong untuk melakukan interaksi dan transaksi secara luas dalam berbagai bidang strategis.

Pemberlakuan dan pelaksanaan ACFTA dan MEA berdampak pada penurunan biaya tarif ekspor-impor menjadi 0-5 persen serta penghapusan batasan kuantitatif dan hambatan non tarif lainnya. Dibukanya ruang-ruang perdagangan bebas dikawasan ASEAN diprediksi mampu mendorong perkembangan positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia, antara lain: pertama, mendorong pendapatan negara melalui ekspor dan impor. Kedua, membuka peluang industrialisasi baru di kawasan Indonesia yang sempat lesu karena krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Ketiga, memperluas lapangan kerja profesional bagi ledakan generasi-generasi muda baru di Indonesia serta memberikan kesempatan berkarir diberbagai wilayah di ASEAN.

Namun pada saat yang bersamaan, kekhawatiran terhadap ekonomi pasar juga menjadi momok yang menakutkan bagi para pengusaha Indonesia, ditengah lemahnya daya saing industri lokal, lemahnya proteksi negara terhadap industri-industri lokal ditakutkan mampu menggerus potensi pengusaha lokal dan beberapa Usaha Kecil Menengah (UKM) yang masih kekurangan dalam berbagai aspek ekonomi. Selain itu secara ekonomi, Indonesia tidak lebih baik dari Singapura, Malaysia, Thailand dan Kamboja. Namun kegagalan ekonomi pasar lama telah membuka pasar bebas dalam cara pandang baru ekonomi pasar yang dibangun diatas otorisasi negara.

Negara menjamin berbagai macam sarana dan prasarana penunjang keberlangsungan pasar, seperti stabilitas keuangan, keamanan domestik, serta penegakan hukum. Bila dibutuhkan, maka negara juga dapat menggunakan kekuatannya agar pasar dapat berjalan dan berfungsi dengan baik. Lebih jauh lagi, bila tidak terdapat pasar dalam area tersebut yang membutuhkan utilitas seperti tanah, air, listrik, pendidikan, jasa kesehatan, ataupun jaminan sosial..

Maka negara harus menyediakan pasar, karena dalam pandangan baru ekonomi pasar, peran negara akan dikurangi secara bertahap dan proporsional untuk menciptakan stabilitas pasar, sehingga peran negara tidak hilang seperti yang dipahami secara konvensional oleh paham ekonomi pasar yang lama, namun

ekonomi pasar tetap menganut azas persaingan bebas yang mengharuskan semua pihak berkonsentrasi pada kualitas dan kecepatan dalam membaca kecenderungan pasar dan secara bersamaan negara memberikan proteksi yang mendukung pada dinamisasi pasar yang positif.

2. Integrasi Ekonomi Sebagai Prasyarat

Hubungan ekonomi dan perdagangan yang semakin erat antar negara dalam kawasan ASEAN telah mendorong terjadinya saling ketergantungan serta keinginan untuk memperkuat hubungan intra negara- negara ASEAN itu sendiri. Salah satu aspek penting yang mendorong dilakukannya perjanjian perdagangan bebas antar negara ASEAN sebagai salah satu kebutuhan dalam memperkuat ekonomi kawasan Asean, adalah keuntungan ekonomi yang bisa didapatkan secara bersama melalui hubungan ekonomi dan perdagangan. Peningkatan hubungan serta keuntungan ekonomi yang terus berlanjut dirasakan sebagai sebuah kebutuhan dalam pemererat hubungan, mendorong kesepakatan keinginan untuk mengintegrasikan ekonomi dengan cara mengurangi hambatan-hambatan perdagangan yang ada selama ini.

Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh Salvatore, menurutnya integrasi ekonomi adalah suatu kebijakan komersial yang secara diskriminatif mengurangi atau bahkan menghapus hambatan-hambatan perdagangan hanya kepada para negara anggota kesepakatan. Kesepakatan penurunan atau penghapusan hambatan perdagangan hanya akan berlaku bagi negara-negara yang saling bersepakat, dan tidak berlaku atau diterapkan bagi negara-negara di luar itu.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Balassa dalam Wang, dia mengartikan integrasi ekonomi sebagai sebuah proses dan rancangan terukur yang merepresentasikan hilangnya segala bentuk diskriminasi ekonomi antar negara. Menurut Balassa, integrasi ekonomi yang pasti adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh Negara-negara bukan aktor atau unit lain. Balassa pun secara jelas menyampaikan bahwa penghapusan hambatan tidak hanya dilakukan pada sektor perdagangan tetapi dalam sektor ekonomi secara keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa integrasi ekonomi adalah penghapusan hambatan-hambatan baik di sektor perdagangan ataupun juga ekonomi secara keseluruhan antar negara-negara yang saling bersepakat dengan tujuan tidak lain adalah untuk meningkatkan integrasi ekonomi di antara negara-negara itu. Terlihat bahwa integrasi ekonomi memiliki tingkatan-tingkatan tertentu sesuai dengan kedalaman integrasinya. Tingkatan-tingkatan integrasi ekonomi itu dijelaskan oleh Balassa dan Salvatore, mereka berpendapat bahwa integrasi ekonomi dilakukan secara berurutan dari yang sangat longgar hingga yang paling dalam. *Pertama*, adalah area perdagangan bebas, yaitu tiap negara anggota bersepakat menghilangkan tarif perdagangan dan hambatan yang bersifat kuantitatif lainnya, namun masing-masing negara itu masih berhak untuk menetapkan aturannya sendiri dalam tariff terhadap negara-negara non anggota

Jika area perdagangan bebas menjadi integrasi ekonomi yang paling longgar atau yang pertama dalam pandangan Balassa, maka menurut Salvatore integrasi ekonomi yang paling longgar adalah pengaturan perdagangan preferensial atau *preferential trade arrangements* dan area perdagangan bebas menjadi tahap

yang kedua. Pengaturan perdagangan bebas menurut Salvatore adalah menurunkan (tidak menghilangkan) hambatan perdagangan antara negara yang bersepakat, lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Kedua, persekutuan pabean atau *customs union*, penghapusan hambatan dalam perdagangan atau pergerakan barang antara negara-negara anggota yang bersepakat (layaknya area perdagangan bebas), ditambah dengan penyeragaman aturan perdagangan, seperti tarif, dengan negara non anggota, hal ini biasa disebut dengan *common external tariffs*; *Ketiga*, tingkatan ekonomi yang lebih tinggi berikutnya adalah pasar bersama atau *common market*. Menurut Balassa dan Salvatore dalam pasar bersama ini, yang dihilangkan atau ditekan tidaklah hanya hambatan dalam perdagangan, tetapi juga hambatan pergerakan faktor produksi seperti orang, dan modal. Selain itu saat ini, menurut Wang, berkembang apa yang disebut dengan pasar tunggal atau *single market*, menurutnya pasar tunggal memiliki tingkat integrasi yang sedikit lebih tinggi daripada pasar bersama, mengutip Peter Lloyd, pasar tunggal adalah prinsip atau hukum satu harga dalam barang, jasa, dan juga faktor-faktor pasar dalam suatu wilayah, sehingga dalam pasar tunggal dilakukanlah penyeragaman peraturan dan prosedur antara negara-negara anggota kesepakatan; *Keempat*, tingkat ekonomi yang paling tinggi, menurut Balassa dan Salvatore adalah persatuan atau uni ekonomi (*economic union*).

Dalam persatuan ekonomi, selain penghilangan hambatan-hambatan perdagangan dan faktor-faktor produksi, negara-negara yang tergabung dalam uni ekonomi bersepakat untuk melakukan penyeragaman dalam kebijakan ekonomi nasional. Penyeragaman itu akan terjadi di bidang moneter, fiskal, finansial, dan juga penanggulangan permasalahan terkait ekonomi lainnya. Integrasi ekonomi dapat dilakukan antar negara yang berada dalam satu wilayah ataupun tidak, beberapa ahli berpendapat integrasi ekonomi sama dengan regionalisme karena mereka tidak membedakan apakah integrasi itu terjadi dalam satu wilayah atau tidak ataupun juga bahwa regionalisme itu haruslah dilakukan antar negara yang berada dalam satu wilayah.

Namun mengacu kepada pengertian regionalisme yang diberikan oleh WTO, yaitu bahwa regionalisme adalah tindakan yang diambil oleh negara-negara untuk melakukan liberalisasi atau memfasilitasi perdagangan dalam lingkup regional, maka dapat disimpulkan bahwa regionalisme adalah integrasi ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam wilayah yang sama atau negara-negara itu berdekatan letaknya. Integrasi ekonomi secara regional dapat dilakukan melalui perjanjian perdagangan, atau yang biasa disebut dengan perjanjian perdagangan bebas atau *free trade agreement* (FTA) ataupun perjanjian perdagangan regional atau *regional trade agreement* (RTA). Kedua istilah ini sering dipakai bergantian karena dalam pandangan WTO pun, RTA tidak hanya sebatas perjanjian perdagangan bebas negara-negara dalam satu wilayah

3. Peran strategis Indonesia dalam kerjasama ASEAN

ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah sebuah komunitas regional yang memiliki kesepakatan bersama untuk mengintegrasikan ekonomi termasuk pasar semua negara anggota ASEAN. Terdapat 10 negara yang tergabung dalam MEA yaitu Brunei Darussalam, Filipina,

Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Mengetahui profil negara ASEAN sangat penting untuk mengukur kekuatan dan kelemahan masing-masing negara, sekaligus menggali peluang-peluang kerjasama bisnis/usaha dan menjadi persiapan dalam menghadapi tenaga kerja dan pelaku ekonomi dari negara-negara tersebut. Begitu pula sebaliknya, sebagai persiapan jika sewaktu-waktu harus pergi, bekerja dan berusaha kenegara-negara anggota MEA.

Perdagangan bebas sebagaimana dimaksud dalam pilar pertama AEC Blueprint adalah menjadikan kawasan ekonomi ASEAN yang bebas dari berbagai hambatan dan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Adapun capaian yang ingin diperoleh adalah pasar dengan aliran bebas barang, aliran bebas jasa, aliran bebas investasi, aliran bebas tenaga terampil dan terdidik, serta aliran modal yang lebih bebas di kawasan ASEAN. Tidak hanya pasar tunggal dan basis produksi saja yang disepakati dalam MEA tetapi MEA juga menyepakati tiga pilar lainnya, yakni ASEAN sebagai kawasan ekonomi berdaya saing tinggi yang memiliki kebijakan kompetisi, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan *e-commerce*.

ASEAN sebagai kawasan yang pembangunan ekonominya merata dengan menitikberatkan pada pengembangan usaha kecil dan menengah, serta prakarsa mengurangi kesenjangan pembangunan di ASEAN khususnya untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos dan Vietnam). ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global melalui pendekatan ekonomi yang koheren dalam hubungan ASEAN dan mitranya di luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produk global.

MEA dibentuk pada tahun 1997-1998, negara-negara anggota ASEAN menyadari pentingnya meningkatkan kerjasama, terutama saat terjadinya krisis ekonomi di Asia Tenggara, sebagai bentuk sikap negara anggota ASEAN terutama dalam menghadapi situasi dan kondisi ekonomi serta persaingan global. Pada KTT ASEAN ke-2 di Kuala Lumpur 15 Desember 1997, para Kepala Negara ASEAN menyepakati ASEAN *Vision 2020*. ASEAN *Vision 2020* yaitu sebuah visi jangka panjang untuk mewujudkan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi dengan pembangunan ekonomi merata yang ditandai oleh penurunan tingkat kemiskinan dan penghilangan perbedaan sosial ekonomi. Para Pemimpin ASEAN memprioritaskan dan mendeklarasikan konsep Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan mengusung tujuan integrasi ekonomi regional tahun 2020.

Konsep MEA ini mengalami kemajuan pada KTT ASEAN ke-10 di Laos, 2004, dengan disusunnya strategi dan program kerja untuk mewujudkan ASEAN *Vision 2020*. Para pemimpin ASEAN memperkuat upaya menuju MEA pada KTT ke-12 di Filipina, 13 Januari 2007, dengan menyepakati "*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*". Disepakati juga percepatan implementasi *blueprint* MEA dari tahun 2020 menjadi 2015. Tepatnya, masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) terimplementasi secara penuh pada 31 Desember 2015/1 Januari 2016 lalu untuk memperkuat daya saing ASEAN dalam persaingan global agar mampu bersaing dengan kawasan perdagangan bebas lainnya termasuk dalam rangka bersaing dengan kemajuan ekonomi mitra perdagangan bebasnya seperti Tiongkok, India, Jepang, maupun di pasar Uni Eropa dan Amerika. Selain itu, untuk meningkatkan posisi tawar dalam konteks

perundingan ASEAN Plus 1 (Tiongkok, Korea, Jepang, Australia-New Zealand, India, Uni Eropa), dan sebagai respons atas kecenderungan terhadap regionalisme. Percepatan juga dilakukan karena beberapa hal berikut:

- i. Adanya potensi penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar 10-20% untuk barang konsumsi sebagai dampak integrasi ekonomi
- ii. Potensi meningkatnya kemampuan kawasan dengan implementasi standar dan praktik internasional, HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) dan adanya persaingan.

Sasaran utama dari pembentukan MEA adalah menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang makmur dan berdaya saing dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta mengurangi tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial-ekonomi di kawasan ASEAN. Masyarakat regional ini juga bertujuan agar masyarakat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif. Hal ini dapat dicapai dengan langkah-langkah dan mekanisme baru untuk mempermudah implementasi inisiatif-inisiatif ekonomi yang telah menjadi kesepakatan dalam mempercepat integrasi untuk sektor-sektor prioritas; mempermudah perpindahan para pelaku usaha, tenaga kerja terampil dan berbakat; serta memperkuat mekanisme institusi ASEAN.

Harapan dari pelaksanaan MEA yaitu bergulirnya MEA diharapkan memberikan manfaat positif bagi perekonomian negara-negara anggotanya sekaligus sebagai upaya negara anggota ASEAN untuk saling menyesuaikan cara pandang di antara sesama negara Asia Tenggara agar lebih terbuka membahas permasalahan domestik yang berdampak kepada kawasan. Keterbukaan tersebut tentunya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN yaitu, saling menghormati (mutual respect), tidak mencampuri urusan dalam negeri (non-interference), konsensus, dialog dan konsultasi.

MEA memiliki empat karakteristik utama, yaitu :

- i. Pasar tunggal dan basis produksi;
- ii. Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi;
- iii. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata;
- iv. Kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

Keempat karakteristik tersebut saling berkaitan erat dan memperkuat satu sama lainnya. Hal ini dibutuhkan, mengingat pentingnya perdagangan ASEAN dengan negara lain di luar kawasan. Juga menjadi kebutuhan MEA untuk tetap berwawasan ke luar ASEAN.

3.1. Kerjasama Indonesia dengan Intra negara Asean

a. Hubungan Indonesia-Singapura

Ekspor Indonesia dengan Negara anggota ASEAN dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Volume ekspor terbesar Indonesia adalah dengan Singapura, Malaysia, dan kemudian di ikuti oleh Thailand. Ekspor Indonesia dengan Singapura pada tahun 2011 sebesar US\$ 18,4 meningkat tahun dibanding tahun sebelumnya 2010 yang hanya S\$ 13,7 dengan share 43,81 %. Besarnya peran tersebut didominasi oleh minyak mentah, gas alam, timah, karet, kopra dan elektronik (untuk memenuhi kebutuhan industri di Singapura. Sementara untuk produk yang di ekspor Singapura ke Indonesia meliputi hasil sulingan minyak bumi, kapal, pakaian jadi, tekstil, pipa besi dan baja dan bahan kimia. Namun pada tahun

2012 (18, 4 Miliar) ekspor Indonesia ke Singapura mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang hanya 17,1 miliar. Sementara untuk impor dari Singapura ke Indonesia untuk tahun 2008 hingga 2010 mengalami fluktuasi dan stabil di tahun 2011 hingga 2012. Neraca perdagangan Indonesia-Singapura selama 5 tahun terakhir (2008-2012) menunjukkan posisi defisit dengan ketiga negara dan defisit terbesar di alami dengan Singapura.

b. Indonesia-Malaysia

Malaysia pun menjadi urutan ke 2 , negara ASEAN yang siap dalam menghadapi AFTA. Ekspor Indonesia ke Malaysia pada tahun 2010 mengalami peningkatan,tercatat sebesar US\$ 19,36 milyar, meningkat 27,66 % dibanding dengan tahun 2009 (US\$ 6,81 milyar). Ekspor Indonesia ke Malaysia tahun 2009 hanya meningkat 3 % dari tahun sebelumnya, namun hingga tahun 2012 ekspor terus meningkat. Tren perdagangan Indonesia dengan Malaysia selama 5 tahun (2008-2012) positif 15 %. Produk unggulan Indonesia yang di ekspor ke Malaysia di antaranya minyak sawit, karet alam, kertas, serta tekstil. Impor Indonesia dari Malaysia pada tahun 2009 sebesar US\$ 5,68 milyar menurun dari tahun sebelumnya sebesar US\$ 8,99 milyar. Penurunan impor ini tercatat pada *refined petroleum products, electronics & Electrical products, crude petroleum, manufactures of metal dan chemicals and chemical products*¹².Trend selama 5 tahun (2008-2012) positif 8%.

Neraca perdagangan Indonesia-Malaysia pada tahun 2012 menunjukan posisi defisit untuk Indonesia sebesar US\$ 12.2 Milyar,atau meningkat dibanding dengan defisit tahun 2011 (10,9 milyar). Selama 5 tahun terakhir (2008-2012) , neraca perdagangan menunjukan posisi surplus bagi Malaysia. Pada periode tahun 2010-2011, neraca perdagangan menunjukan posisi surplus bagi Indonesia sebesar US\$ 9,36 milyar dan US\$ 10,9 milyar.

c. Indonesia-Thailand

Negara ke 3 yang mendominasi perdagangan di kawasan ASEAN adalah Thailand. Dari grafik ekspor Indonesia ke Thailand dari tahun 2009-2012 mengalami peningkatan walaupun peningkatan dari tahun ke tahun tidak signifikan. Trend selama 5 tahun (2008 - 2012) positif 16 %. Ekspor Indonesia ke Thailand di antaranya adalah kayu lapis dan minyak bumi. Sementara untuk Impor dari Thailand ke Indonesia meningkat tipis dari tahun 2008-2012 dengan share 15,5% di tahun 2008 dan share 21,3 % di tahun 2012. Produk impor Thailand yang membanjiri Indonesia di antaranya beras dan gula. Ketergantungan Indonesia terhadap impor beras Thailand dikarenakan Indonesia mengalami krisis ketahanan pangan nasional. Dari beberapa literatur, kini Thailand mampu mengekspor 2,3 juta unit mobil per tahun di kawasan ASEAN hal ini menandakan bahwa industri di Thailand cukup maju. Neraca perdagangan Indonesia - Thailand tahun 2012 menunjukkan defisit untuk Indonesia sebesar US\$ 6,63 milyar, meningkat dari tahun sebelumnya.

Sedangkan neraca perdagangan menunjukkan posisi surplus bagi Thailand sehingga dapat dikatakan bahwa neraca perdagangan Indonesia –Thailand selama 5 tahun mengalami defisit. Konflik geopolitik yang tengah dihadapi Thailand beberapa bulan ini memberi dampak baik positif maupun negatif bagi Indonesia dan

negara-negara anggota ASEAN. Dampak positif bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN sekitarnya adalah seperti beralihnya tujuan wisatawan mancanegara dan mendorong sebagian pelaku usaha untuk memindahkan basis produksinya ke Filipina, Vietnam, atau Indonesia. Untuk Indonesia sendiri dampak yang paling terasa adalah ekspor elektronik dan otomotif ke Thailand menurun. Sementara impor dari Thailand ke Indonesia juga mengalami penurunan.

3.2. Kerjasama ASEAN dengan negara mitra strategis ASEAN – Jepang

Kerja sama ASEAN-Jepang, yang pada awalnya ditekankan pada hubungan kerja sama ekonomi, secara formal dimulai dari pembentukan Forum ASEAN-Jepang pada bulan Maret 1977. Forum ini kemudian diikuti dengan pendirian Pusat Promosi Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata yang saat ini lebih dikenal sebagai ASEAN-Japan Centre/AJC

Kerja sama ASEAN-Jepang memberikan prioritas pada bidang kontra terorisme, lingkungan hidup, penanganan bencana alam, kesehatan dan kesejahteraan, keamanan maritim, termasuk penanganan pembajakan laut, dan pertukaran pemuda/masyarakat. Jepang juga mendukung implementasi *Master Plan of ASEAN Connectivity* melalui kerja sama pengembangan konektivitas.

Pada ke-14 ASEAN-Jepang di Bali tanggal 18 November 2011, para pemimpin ASEAN dan Jepang membahas berbagai bidang kerja sama seperti *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership, disaster management, ASEAN Connectivity, People-to-People Contact, Narrowing Development Gap*, dan isu politik mengenai Myanmar. Dalam KTT tersebut juga dikeluarkan dokumen *Joint Declaration for Enhancing ASEAN-Japan Strategic Partnership for Prospering Together (Bali Declaration)* dan *ASEAN-Japan Plan of Action 2011-2015* sebagai pedoman bagi kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, perdagangan dan investasi, dan hubungan sosial budaya yang bermuara pada terbentuknya Komunitas ASEAN 2015. Disepakati bahwa implementasi kerja sama dituangkan melalui berbagai mekanisme seperti *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *ASEAN Plus Three (APT)*, *East Asia Summit (EAS)*, dan *ASEAN Defense Ministers' Meeting Plus (ADMM Plus)*.

Kerja sama dalam bidang ekonomi antara ASEAN dengan Jepang pertama kali diwujudkan melalui penandatanganan *Joint Declaration of the Leaders on the Comprehensive Economic Partnership between ASEAN and Japan*, Phnom Penh - Kamboja, 5 November 2002, dan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and Japan*, Bali - Indonesia, 8 Oktober 2003. Dalam perkembangannya, ASEAN dan Jepang kemudian menandatangani kesepakatan *Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member States of the ASEAN and Japan (AJCEP)* secara *ad-referendum* pada April 2008. AJCEP menyetujui ketentuan perdagangan barang (*trade in goods*).

ASEAN – Republik Rakyat Tiongkok

Hubungan kerja sama ASEAN dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) secara informal dimulai pada tahun 1991 dan kemudian RRT dikukuhkan menjadi mitra wicara ASEAN pada tahun 1996. Kerja sama kemitraan ASEAN dan RRT

memiliki 11 prioritas bidang kerja sama, yaitu pertanian, energi, informasi dan teknologi komuni kasi, sumber daya manusia, investasi bersama, pembangunan wilayah Mekong, transportasi, kebudayaan, pariwisata, kesehatan publik dan lingkungan hidup, infrastruktur, sumber daya alam dan energi. Di bidang ekonomi, perdagangan antara ASEAN dan RRT pada tahun 2010 kembali mengalami peningkatan setelah sempat turun pada tahun 2009 sebagai akibat krisis keuangan global. Ekspor ASEAN ke RRT yang meningkat sebesar 39,1% dan US\$ 81,6 miliar pada 2009 menjadi US\$ 113,5 miliar di tahun 2010, membuat RRT menjadi tujuan ekspor kedua terbesar ASEAN. RRT mempertahankan posisinya sebagai mitra dagang terbesar ASEAN 11,3% total perdagangan ASEAN.

Sementara itu, ASEAN merupakan mitra dagang terbesar ke-4 RRT dihitung dan 98% total perdagangannya. Kerja sama ASEAN-RRT dalam kerangka area perdagangan bebas dimulai sejak penandatanganan *Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism Agreement* oleh Menteri bidang Ekonomi negara anggota ASEAN dan RRT pada bulan November 2004. Sementara itu, *Agreement on Services dan Second Protocol to Amend the Framework Agreement* ditandatangani pada bulan Januari 2007 di Cebu, Filipina. Implementasi FTA ASEAN-RRT di bidang perdagangan barang telah dilakukan sejak 1 Januari 2010. Dalam menyikapi hal tersebut, ASEAN dan RRT telah meluncurkan *ASEAN-China FTA Business Portal (BIZ Portal)* pada penyelenggaraan Forum *ASEAN-China Free Trade Area* di Nanning City, Guangxi Zhuong tanggal 7 Januari 2010. BIZ Portal tersebut menyediakan informasi penting kepada para pelaku usaha dalam kerangka FTA ASEAN -RRT. Selanjutnya BIZ Portal diharapkan dapat berkembang menjadi *e-commerce* sebagai salah satu sarana transaksi bisnis antara perusahaan ASEAN dan RRT. Pada akhir rangkaian KTT ke-14 ASEAN-RRT, diresmikan pendirian ASEAN-China Centre (ACC) yang berfungsi sebagai pusat promosi kerja sama perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan antara ASEAN dan RRT.

ASEAN – Republik Korea

Kemitraan ASEAN dan Republik Korea pertama kali terjalin pada bulan November 1989 dan sejak tahun 1991 Republik Korea menjadi mitra dialog penuh ASEAN. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, *ASEAN-Republic of Korea Free Trade Agreement (AKFTA)* secara khusus dimulai dengan penandatanganan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation dan Dispute Settlement Mechanism under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Partnership* di pada 13 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kerangka kerja tersebut bertujuan untuk memperkuat sekaligus meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi. Tujuan itu dicapai dengan meliberalisasikan dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan rezim investasi yang transparan, bebas, dan fasilitatif. Perjanjian ini kemudian diikuti dengan penandatanganan *Agreement on Trade in Goods (2006), ASEAN-Republic of Korea Agreement on Trade in Services (2007), dan ASEAN-Republic of Korea Agreement on Trade in Investment (2009)*. Guna memaksimalkan kerangka AKFTA khususnya dalam bidang perdagangan barang, para Menteri Ekonomi ASEAN dan Republik Korea

telah menandatangani *Second Protocol to Amend Trade in Goods Under AKFTA* di sela-sela KTT ke-19 ASEAN pada 18 November 2011, Nusa Dua, Bali.

ASEAN-India

India menjadi Mitra Wicara ASEAN pada saat KTT ke-5 ASEAN di Bangkok tanggal 14-15 Desember 1995 setelah sebelumnya menjadi mitra wicara sektoral sejak 1992. ASEAN dan India berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Perdagangan dan investasi, pengembangan SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi informasi, dan hubungan antar masyarakat. Komitmen ASEAN dan India tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan

- (1) *ASEAN-India Partners hip for Peace, Progress and Shared Prosperity* dan
- (2) *Plan of Action to Implement the ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and shared Prosperity (PoA)* pada KTT ke-3 ASEAN-India di Vientiane, Laos tanggal 30 November 2004. Kedua dokumen tersebut merupakan dasar pelaksanaan kerja sama kemitraan ASEAN-India hingga saat ini. Kerja sama ekonomi ASEAN dan India diatur antara lain dalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and India* yang ditandatangani para Kepala Negara / Pemerintahan ASEAN dan India pada bulan Oktober 2003.

Kesepakatan tersebut kemudian diikuti dengan penandatanganan *ASEAN-India Trade in Goods Agreement* enam tahun berselang, atau tepatnya pada 13 Oktober 2009, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010. *ASEAN-India Trade in Goods Agreement* mencakup liberalisasi sekitar 90% produk yang diperdagangkan di kedua kawasan, termasuk produk yang dikenal dengan sebutan “*Special Product*”, seperti minyak sawit, kopi, teh hitam, dan merica. Sekitar 4.000 tarif akan dihapus pada tahun 2016.

ASEAN-Australia

Kerja sama ASEAN-Australia dimulai pada tahun 1974, diawali dengan pembentukan *ASEAN-Australia Consultative Meeting (AACM)* yang kemudian diikuti dengan berbagai dialog ASEAN-Australia pada berbagai tingkatan al. *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *ASEAN-Australia Forum* dan berbagai kelompok kerja seperti di bidang perdagangan dan investasi, telekomunikasi, pendidikan dan pelatihan, industri dan teknologi, lingkungan hidup serta kebudayaan dan informasi. Untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan, ASEAN dan Australia serta Selandia Baru telah menandatangani persetujuan FTA ASEAN – Australia dan Selandia Baru (*ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Area/AANZFTA*) di sela-sela penyelenggaraan KTT ke-14 ASEAN di Hua Hin, Thailand pada 27 Februari 2009. Kesepakatan AANZFTA itu mengamanatkan pengurangan tarif secara bertahap dimulai pada 1 Januari 2010. Kesepakatan AANZFTA merupakan FTA pertama ASEAN dengan mitranya yang mencakup berbagai elemen secara lengkap yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, jasa keuangan, telekomunikasi; *electronic commerce*, *Movement of Natural Person*, Hak Kekayaan Intelektual, persaingan usaha, dan kerjasama ekonomi.

ASEAN-Amerika Serikat

Kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat yang berlangsung sejak tahun 1977 meliputi bidang kerja sama yang luas, antara lain di bidang politik dan keamanan: nonproliferasi senjata nuklir di kawasan, kejahatan lintas negara, kontra terorisme, pembangunan kapasitas, penegakan hukum, dan promosi HAM. Sedangkan di bidang ekonomi meliputi: perdagangan, investasi, dukungan Amerika Serikat untuk implementasi konektivitas ASEAN, pembangunan tatanan ekonomi global, dan kerja sama keuangan. Landasan kerja sama bidang ekonomi dan perdagangan adalah *US-ASEAN Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)* yang ditandatangani pada tahun 2006 pada Pertemuan ke-38 AEM di Kuala Lumpur, tanggal 25 Agustus 2006 oleh Menteri Ekonomi Negara Anggota ASEAN dan *United States Trade Representative/USTR* yang khusus menangani kerja sama yang terkait dengan perdagangan dan investasi, Visi Pembangunan ASEAN untuk Memajukan Integrasi Ekonomi (*ASEAN Development Vision to Advance Economic Integration/ADVANCE*).

ASEAN-Kanada

Kerjasama ASEAN dan Kanada pertama kali dimulai pada tahun 1977 saat itu Kanada menyampaikan komitmen bantuan program pembangunan untuk ASEAN dan berkeinginan menjalin kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, industri, dan kerja sama pembangunan. Dalam perkembangan kemudian kedua belah pihak juga menyepakati untuk bekerja sama di bidang kontra terorisme internasional, kejahatan lintas negara, keamanan kesehatan, dialog antar keyakinan, dan bantuan teknis serta pengembangan kapasitas Sekretariat ASEAN. Di bidang kerja sama ekonomi khususnya bantuan teknis dan pengembangan kapasitas Sekretariat ASEAN, Kanada telah memberikan persetujuan atas proposal *ASEAN-Canada Cooperation on Technical Initiatives for the VAP (ACTIV)* sebagai fasilitas dukungan para ahli dan Kanada melalui Sekretariat ASEAN. Kemudian, pada KTT ke-14 ASEAN disahkan *Declaration on the Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015* yang kemudian ASEAN meminta Kanada untuk menyetujui merevisi *Terms of Reference (ToR) on ASEAN-Canada Technical Initiatives* yang sebelumnya didasarkan atas *Vientiane Action Program (yAP)*.

Pertemuan formal ASEAN dan Kanada pertama kali dilaksanakan melalui *ASEAN Standing Committee (ASC)*, Februari 1977. Pada Pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Kanada menyampaikan komitmen bantuan program pembangunan untuk ASEAN. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan *ASEAN-Canada Economic Cooperation Agreement (ACECA)* pada tanggal 25 September 1981 di New York, Amerika Serikat. Persetujuan tersebut diikuti oleh pembentukan *ASEAN-Canada Joint Cooperation Committee (ICC)* pada tanggal 1 Juni 1982 yang berfungsi sebagai forum dialog bagi ASEAN dan Kanada guna membahas kerja sama di bidang-bidang ekonomi, perdagangan, investasi, industri, dan kerja sama pembangunan.

3.3. Kemitraan ASEAN-Uni Eropa

Kemitraan ASEAN-Uni Eropa (*European Union/EU*) secara informal dimulai tahun 1972. Adapun secara formal kemitraan dimulai tahun 1977 dengan pembentukan kerja sama perdagangan, ekonomi dan teknis, serta pembentukan *Joint Cooperation Committee* (JCC). ICC bertugas untuk mengawasi kerja sama tersebut. Mekanisme kerja sama ASEAN -Uni Eropa dijalankan melalui dua skema, yaitu, *Trans-Regional EU-ASEAN Trade Initiative* (TREATI) untuk bidang perdagangan dan investasi, yang diluncurkan tahun 2003; serta *Regional EU-ASEAN Dialog Instrument* (READI) yang disepakati tahun 2005 untuk bidang nonperdagangan. Peningkatan kerja sama ekonomi dilakukan dengan perundingan *ASEAN- EU Free Trade Agreement* (ETA) berdasarkan pendekatan *region-to-region approach*, dan memperhatikan tingkat perekonomian masing-masing negara anggota ASEAN. Perundingan ASEAN-EU FTA diluncurkan pada Pertemuan *AEM-EU Trade Consultations* di Brunei Darussalam, tanggal 4 Mei 2007 melalui *Joint Ministerial Statement on the Launch of the ASEAN-EU FTA Negotiations*. Untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, telah dibentuk *joint Committee on ASEAN-EU Free Trade Agreement* (JCAEFTA) guna melakukan negosiasi FTA, yang pertama kali dilaksanakan pada tanggal 19-20 Juli 2007. Pada Pertemuan ke-7 JCAEFTA di Kuala Lumpur tanggal 4-5 Maret 2009, dibahas beberapa *pending matters* dalam negosiasi *ASEAN-EU FTA*, antara lain: lambatnya proses negosiasi, perbedaan tingkat ambisi antara ASEAN dan Uni Eropa, dan isu Myanmar.

3.4. Manfaat Integrasi Ekonomi

Kesediaan Indonesia bersama-sama dengan 9 (sembilan) Negara ASEAN lainnya membentuk *ASEAN Economic Community* (AEC) pada tahun 2015 tentu saja didasarkan pada keyakinan atas manfaatnya yang secara konseptual akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kawasan ASEAN. Integrasi ekonomi dalam mewujudkan AEC 2015 melalui pembukaan dan pembentukan pasar yang lebih besar, dorongan peningkatan efisiensi dan daya saing, serta pembukaan peluang penyerapan tenaga kerja di kawasan ASEAN, akan meningkatkan kesejahteraan seluruh negara di kawasan.

Pewujudan AEC di tahun 2015 akan menempatkan ASEAN sebagai kawasan pasar terbesar ke-3 di dunia yang didukung oleh jumlah penduduk ke-3 terbesar (8% dari total penduduk dunia) di dunia setelah China dan India. Pada tahun 2008, jumlah penduduk ASEAN sudah mencapai 584 juta orang (*ASEAN Economic Community Chartbook*, 2009), dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan usia mayoritas berada pada usia produktif. Pertumbuhan ekonomi individu Negara ASEAN juga meningkat dengan stabilitas makroekonomi ASEAN yang cukup terjaga dengan inflasi sekitar 3,5 persen³. Jumlah penduduk Indonesia yang terbesar di kawasan (40% dari total penduduk ASEAN) tentu saja merupakan potensi yang sangat besar bagi Indonesia menjadi negara ekonomi yang produktif dan dinamis yang dapat memimpin pasar ASEAN di masa depan.

Pada umumnya, konsentrasi perdagangan ASEAN masih dengan dunia meskipun cenderung menurun dan beralih ke intra -ASEAN. Data perdagangan

ASEAN menunjukkan bahwa share perdagangan ke luar ASEAN semakin menurun, dari 80,8% pada tahun 1993 turun menjadi 73,2% pada tahun 2008, sedangkan share perdagangan di intra-ASEAN meningkat dari 19,2% pada tahun 1993 menjadi 26,8% pada tahun 2008. Hal yang sama juga terjadi dengan Indonesia dalam 5 tahun terakhir, namun perubahannya tidak signifikan. Nilai ekspor Indonesia ke intra-ASEAN hanya 18-19% sedangkan ke luar ASEAN berkisar 80-82% dari total eksponya, Hal ini berarti peluang untuk meningkatkan ekspor ke intra-ASEAN masih harus ditingkatkan agar laju peningkatan ekspor ke intra-ASEAN berimbang dengan laju peningkatan impor dari intra-ASEAN.

Indonesia sudah mencatat 10 (sepuluh) komoditi unggulan eksponya baik ke dunia maupun ke intra-ASEAN selama 5 tahun terakhir ini (2004-2008) dan 10 (sepuluh) komoditi ekspor yang potensial untuk semakin ditingkatkan. Komoditi unggulan ekspor ke dunia adalah minyak kelapa sawit, tekstil & produk tekstil, elektronik, produk hasil hutan, karet & produk karet, otomotif, alas kaki, kakao, udang, dan kopi, sedangkan komoditi ekspor ke intra-ASEAN adalah minyak petroleum mentah, timah, minyak kelapa sawit, *refined copper*, batubara, karet, biji kakao, dan emas.

Disamping itu, Indonesia mempunyai komoditi lainnya yang punya peluang untuk ditingkatkan nilai eksponya ke dunia adalah peralatan kantor, rempah-rempah, perhiasan, kerajinan, ikan & produk perikanan, minyak atsiri, makanan olahan, tanaman obat, peralatan medis, serta kulit & produk kulit. Tentu saja, Indonesia harus cermat mengidentifikasi tujuan pasar sesuai dengan segmen pasar dan spesifikasi dan kualitas produk yang dihasilkan.

Kerjasama tersebut di atas merupakan fakta yang menunjukkan bahwa ASEAN merupakan pasar dan memiliki basis produksi. Fakta fakta tersebut merupakan faktor yang mendorong meningkatnya investasi di dalam negeri masing-masing anggota dan intra-ASEAN serta masuknya investasi asing ke kawasan. Sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbesar (40%) diantara Negara Anggota ASEAN, Indonesia diharapkan akan mampu menarik investor ke dalam negeri dan mendapat peluang ekonomi yang lebih besar dari Negara Anggota ASEAN lainnya. Dari segi peningkatan investasi, berbagai negara ASEAN mengalami penurunan rasio investasi terhadap PDB sejak krisis, antara lain akibat berkembangnya *regional hub-production*.

Bagi Indonesia, salah satu faktor penyebab penting penurunan rasio investasi ini adalah belum membaiknya iklim investasi dan keterbatasan infrastruktur. Dalam rangka AEC 2015, berbagai kerjasama regional untuk meningkatkan infrastruktur (pipa gas, teknologi informasi) maupun dari sisi pembiayaan menjadi agenda. Kesempatan tersebut membuka peluang bagi perbaikan iklim investasi Indonesia melalui pemanfaatan program kerja sama regional, terutama dalam melancarkan program perbaikan infrastruktur domestik. Sedangkan, kepentingan untuk harmonisasi dengan regional menjadi prakondisi untuk menyesuaikan peraturan investasi sesuai standar kawasan.

Liberalisasi perdagangan barang ASEAN akan menjamin kelancaran arus barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN karena hambatan tarif dan non-tarif yang berarti sudah tidak ada lagi. Kondisi pasar yang

sudah bebas di kawasan dengan sendirinya akan mendorong pihak produsen dan pelaku usaha lainnya untuk memproduksi dan mendistribusikan barang yang berkualitas secara efisien sehingga mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Di sisi lain, para konsumen juga mempunyai alternatif pilihan yang beragam yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Indonesia sebagai salah satu Negara besar yang juga memiliki tingkat integrasi tinggi di sektor elektronik dan keunggulan komparatif pada sektor berbasis sumber daya alam, berpeluang besar untuk mengembangkan industri di sektor-sektor tersebut di dalam negeri.

Di bidang jasa, ASEAN juga memiliki kondisi yang memungkinkan agar pengembangan sektor jasa dapat dibuka seluas-luasnya. Sektor-sektor jasa prioritas yang telah ditetapkan yaitu pariwisata, kesehatan, penerbangan dan e- ASEAN dan kemudian akan disusul dengan logistik. Namun, perkembangan jasa prioritas di ASEAN belum merata, hanya beberapa negara ASEAN yang mempunyai perkembangan jasa yang sudah berkembang seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Kemajuan ketiga negara tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penggerak dan acuan untuk perkembangan liberalisasi jasa di ASEAN. Lebih lanjut, untuk liberalisasi aliran modal dapat berpengaruh pada peningkatan sumber dana sehingga memberikan manfaat yang positif baik pada pengembangan system keuangan, alokasi sumber daya yang efisien, serta peningkatan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Dari sisi jumlah tenaga kerja, Indonesia yang mempunyai penduduk yang sangat besar dapat menyediakan tenaga kerja yang cukup dan pasar yang besar, sehingga menjadi pusat industri. Selain itu, Indonesia dapat menjadikan ASEAN sebagai tujuan pekerjaan guna mengisi investasi yang akan dilakukan dalam rangka AEC 2015. Standardisasi yang dilakukan melalui *Mutual Recognition Arrangements (MRAs)* dapat memfasilitasi pergerakan tenaga kerja tersebut.

3.5. Aliran Modal dan Peningkatan Ekspor

Dari sisi penarikan aliran modal asing, ASEAN sebagai kawasan dikenal sebagai tujuan penanaman modal global, termasuk CLMV khususnya Vietnam. AEC membuka peluang bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan aliran modal masuk ke kawasan yang kemudian ditempatkan di aset berdenominasi rupiah. Aliran modal tersebut tidak saja berupa porsi dari portfolio regional tetapi juga dalam bentuk aliran modal langsung (PMA).

Sedangkan dari sisi peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga, peraturan terkait, maupun sumber daya manusia, berbagai program kerja sama regional yang dilakukan tidak terlepas dari keharusan melakukan harmonisasi, standarisasi, maupun mengikuti MRA yang telah disetujui bersama. Artinya akan terjadi proses perbaikan kapasitas di berbagai institusi, sektor maupun peraturan terkait. Sebagai contoh adalah penerapan ASEAN *Single Window* yang seharusnya dilakukan pada tahun 2008 (hingga saat ini masih dalam proses) untuk ASEAN-6 mengharuskan penerapan sistem *National Single Window (NSW)* di masing-masing negara.

Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia memasuki integrasi ekonomi ASEAN tidak hanya yang bersifat internal di dalam negeri tetapi terlebih lagi persaingan dengan negara sesama ASEAN dan negara lain di luar ASEAN seperti China dan India. Kinerja ekspor selama periode 2004 – 2008 yang berada di

urutan ke-4 setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand, dan importer tertinggi ke-3 setelah Singapura dan Malaysia, merupakan tantangan yang sangat serius ke depan karena telah mengakibatkan neraca perdagangan Indonesia yang defisit terhadap beberapa Negara ASEAN tersebut.

Ancaman yang diperkirakan lebih serius lagi adalah perdagangan bebas ASEAN dengan China. Hingga tahun 2007, nilai perdagangan Indonesia dengan China masih mengalami surplus, akan tetapi pada tahun 2008, Indonesia mengalami defisit sebesar + US\$ 3600 juta. Apabila kondisi daya saing Indonesia tidak segera diperbaiki, nilai defisit perdagangan dengan China akan semakin meningkat. Akhir - akhir ini para pelaku usaha khususnya yang bergerak di sektor industri petrokimia hulu, baja, tekstil dan produk tekstil, alas kaki serta elektronik, menyampaikan kekhawatirannya dengan masuknya produk-produk sejenis dari China dengan harga yang relatif lebih murah dari produksi dalam negeri.

Tantangan lainnya adalah laju inflasi Indonesia yang masih tergolong tinggi bila dibandingkan dengan Negara lain di kawasan ASEAN. Stabilitas makro masih menjadi kendala peningkatan daya saing Indonesia dan tingkat kemakmuran Indonesia juga masih lebih rendah dibandingkan negara lain. Populasi Indonesia yang terbesar di ASEAN membawa konsekuensi tersendiri bagi pemerataan pendapatan, 3 (tiga) Negara ASEAN yang lebih baik dalam menarik PMA mempunyai pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari Indonesia.

3.6. Dampak Negatif Arus Modal yang Lebih Bebas

Arus modal yang lebih bebas untuk mendukung transaksi keuangan yang lebih efisien, merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan, memfasilitasi perdagangan internasional, mendukung pengembangan sektor keuangan dan akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun demikian, proses liberalisasi arus modal dapat menimbulkan ketidakstabilan melalui dampak langsungnya pada kemungkinan pembalikan arus modal yang tiba-tiba maupun dampak tidak langsungnya pada peningkatan permintaan domestik yang akhirnya berujung pada tekanan inflasi. Selain itu, aliran modal yang lebih bebas di kawasan dapat mengakibatkan terjadinya konsentrasi aliran modal ke Negara tertentu yang dianggap memberikan potensi keuntungan lebih menarik. Hal ini kemudian dapat menimbulkan risiko tersendiri bagi stabilitas makroekonomi.

Hal lain yang perlu dicermati adalah kesamaan keunggulan komparatif kawasan ASEAN, khususnya di sektor pertanian, perikanan, produk karet, produk berbasis kayu, dan elektronik. Kesamaan jenis produk ekspor unggulan ini merupakan salah satu penyebab pangsa perdagangan intra -ASEAN yang hanya berkisar 20-25 persen dari total perdagangan ASEAN. Indonesia perlu melakukan strategi peningkatan nilai tambah bagi produk eskpornya sehingga mempunyai karakteristik tersendiri dengan produk dari Negara -negara ASEAN lainnya.

Tantangan lain yang juga dihadapi oleh Indonesia adalah peningkatan keunggulan komparatif di sektor prioritas integrasi. Saat ini Indonesia memiliki keunggulan di sektor/komoditi seperti produk berbasis kayu, pertanian, minyak sawit, perikanan, produk karet dan elektronik, sedangkan untuk tekstil, elektronik,

mineral (tembaga, batu bara, nikel), mesin-mesin, produk kimia, karet dan kertas masih dengan tingkat keunggulan yang terbatas.

Kemampuan bersaing SDM tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan baik secara formal maupun informal. Kemampuan tersebut diharapkan harus minimal memenuhi ketentuan dalam MRA yang telah disetujui. Pada tahun 2008-2009, Mode 3 pendirian perusahaan (commercial presence) dan Mode 4 berupa mobilitas tenaga kerja (movement of natural persons) intra ASEAN akan diberlakukan untuk sektor prioritas integrasi.

Untuk itu, Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas tenaganya sehingga bisa digunakan baik di dalam negeri maupun intra-ASEAN, untuk mencegah banjirnya tenaga kerja terampil dari luar. Pekerjaan ini tidaklah mudah karena memerlukan adanya cetak biru sistem pendidikan secara menyeluruh, dan sertifikasi berbagai profesi terkait.

3.7. Daya Saing Indonesia dan Tingkat Perkembangan Ekonomi

Tingkat perkembangan ekonomi Negara-negara Anggota ASEAN hingga saat ini masih beragam. Secara sederhana, penyebutan ASEAN-6 dan ASEAN-4 dimaksudkan selain untuk membedakan tahun bergabungnya dengan ASEAN, juga menunjukkan perbedaan tingkat ekonomi. Apabila diteliti lebih spesifik lagi, tingkat kemajuan berikut ini juga terdapat diantara Negara Anggota ASEAN: kelompok negara maju (Singapura), kelompok negara dinamis (Thailand dan Malaysia), kelompok negara pendapatan menengah (Indonesia, Filipina, dan Brunei), dan kelompok negara belum maju (CLMV). Tingkat kesenjangan yang tinggi tersebut merupakan salah satu masalah di kawasan yang cukup mendesak untuk dipecahkan agar tidak menghambat percepatan kawasan menuju MEA 2015. Oleh karenanya, ASEAN dalam menentukan jadwal komitmen liberalisasi mempertimbangkan perbedaan tingkat ekonomi tersebut. Dalam rangka membangun ekonomi yang merata di kawasan (region of equitable economic development), ASEAN harus bekerja keras di dalam negeri masing-masing dan bekerja sama dengan sesama ASEAN.

Menurut Kompas tanggal 25 November 2015 melansir berita bahwa *Institute of Management Development* (IMD) yang merupakan lembaga pendidikan bisnis terkemuka di Swiss melaporkan hasil penelitiannya berjudul *IMD World Talent Report 2015*. Penelitian ini berbasis survei yang menghasilkan peringkat tenaga berbakat dan terampil di dunia tahun pada tahun 2015. Tujuan dari diadakannya pemeringkatan oleh IMD adalah untuk menilai sejauh mana negara tersebut menarik dan mampu mempertahankan tenaga berbakat dan terampil yang tersedia di negaranya untuk ikut berpartisipasi dalam perekonomian di suatu negara. Laporan ini terasa spesial karena Indonesia termasuk dalam salah satu dari 61 negara di dunia yang di survei. Namun demikian, dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa peringkat Indonesia turun 16 peringkat dari peringkat ke-25 pada tahun 2014 menjadi peringkat ke-41 pada tahun 2015. Posisi Indonesia berada jauh di bawah posisi negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, bahkan Thailand. Posisi Indonesia juga hanya sedikit lebih baik dari Filipina. Peringkat ini dihitung dengan bobot tertentu dengan mempertimbangkan tiga faktor yaitu faktor pengembangan

dan investasi, faktor daya tarik suatu negara, dan faktor kesiapan sumber daya manusia. Masing masing faktor terbagi lagi ke dalam beberapa rincian lainnya.

Dua faktor pertama Indonesia mempunyai peringkat yang relatif sama dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi untuk faktor ketiga yaitu kesiapan sumber daya manusia merupakan hal yang paling dominan menyumbang angka penurunan peringkat tenaga terampil Indonesia di tahun 2015. Pada tahun 2014, Indonesia masih menduduki peringkat ke-19 untuk faktor ini. Di tahun 2015, peringkat kesiapan tenaga kerja Indonesia terjerembab ke peringkat 42. Faktor kesiapan tenaga kerja Indonesia dirasa masih kurang bersaing dari negara lain di tahun 2015. Untuk faktor ini, Indonesia hanya unggul dalam pertumbuhan angkatan kerja saja dimana Indonesia menduduki peringkat kelima. Indikator lainnya seperti pengalaman internasional, kompetensi senior manajer, sistem pendidikan, pendidikan manajerial, dan pada keterampilan bahasa berada pada peringkat di atas 30. Bahkan untuk keterampilan keuangan, Indonesia berada pada peringkat ke-44.

Hasil survei lain dari World Bank dengan judul *Ease of Doing Business* 2016 yang dirilis beberapa bulan lalu sedikit kontradiktif. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa kemudahan berusaha di Indonesia meningkat sebelas peringkat dari sebelumnya peringkat ke-120 menjadi peringkat ke-109 dari 189 negara yang disurvei oleh World Bank. Kemudahan bisnis di Indonesia akan mendorong para pengusaha dari dalam maupun luar negeri untuk memulai bisnis ataupun melakukan ekspansi bisnis di Indonesia. Di sisi lain, apabila dikaitkan dengan *IMD World Talent Report 2015*, penulis berpandangan bahwa hal ini merupakan sinyal bahwa tenaga berbakat dan terampil Indonesia kurang bisa bersaing dengan baik dengan warga negara ASEAN lainnya khususnya Singapura, Thailand dan Malaysia. Jangan sampai kemudahan bisnis yang telah diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia justru lebih dimanfaatkan negara lain dalam berbisnis di Indonesia dengan tetap membawa tenaga kerja terampil dari negaranya sementara warga negara Indonesia tidak bisa bersaing dengan warga negara asing lainnya.

Survei tentang sisi positif Indonesia juga diungkap oleh Legatum Institute dalam *The Legatum Prosperity Index 2015*. Survei tersebut menceritakan kisah kemajuan manusia tidak hanya sekedar dari sisi ekonomi. Agar suatu negara tumbuh dengan baik, suatu negara harus memberikan kesempatan dan kebebasan kepada warganya. Survei ini juga menunjukkan bagaimana akses terhadap kualitas kesehatan dan pendidikan sehingga negara tersebut bisa tumbuh menjadi negara yang lebih maju. Survei juga membuktikan bahwa pemerintahan yang efektif dan transparan akan mampu memberdayakan warga negaranya untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Hal yang patut digarisbawahi dalam *Prosperity Index 2015* adalah bahwa Indonesia berdiri sebagai negara dengan performa terbaik secara keseluruhan. Hal ini tercermin bahwa dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir sejak tahun 2009, Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 21 peringkat dari peringkat ke-85 ke peringkat ke-64.

Terlepas dari hasil berbagai macam survei dengan berbagai rincian di dalamnya, penulis dan beberapa peneliti di bidang Pemantauan Sistem Keuangan di Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal berpandangan bahwa Indonesia tidak seharusnya merasa berkecil hati ataupun terlalu berbangga diri dengan hasil survei tersebut. Indonesia harus kembali fokus pada perbaikan di dalam

negeri. Masih begitu banyak ruang yang bisa digali untuk dilakukan perbaikan. Masih begitu banyak juga pekerjaan rumah bagi Indonesia dalam mengejar ketertinggalannya. Namun demikian, hal ini sangat tidak mustahil apabila semua pihak bersungguh-sungguh mengusahakannya, khususnya dalam bidang peningkatan sumber daya manusia, sehingga cita-cita Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang salah satunya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur akan tercapai. Hal lain yang tak kalah penting adalah koordinasi antar berbagai pihak terkait. Koordinasi merupakan kata sederhana namun mahal harganya dan susah dikerjakan di negeri tercinta ini.

4. Simpulan

Secara teoritis, perdagangan bebas antar kedua Negara akan membuat Negara yang memiliki keunggulan komparatif akan saling mengimpor atau mengekspor dan akibatnya volume perdagangan akan sama meningkat jika masing-masing mengambil spesialisasi dalam memproduksi barang. Dalam hal ini Indonesia sangat diuntungkan karena merupakan salah satu Negara dengan jumlah penduduk dan wilayah terbesar di kawasan ASEAN, ini merupakan suatu kesempatan bagi Indonesia dalam memajukan perekonomian jika Indonesia benar-benar berperan aktif dalam memanfaatkan momen ini. Tidak hanya sebagai Negara tujuan ekspor namun Indonesia juga diharapkan mampu menjadi raksasa yang mampu mengekspor produk ke seluruh kawasan ASEAN.

Secara umum Indonesia belum siap dengan diberlakukannya MEA karena masih ada sector yang vital dalam perdagangan bebas seperti infrastruktur dan logistic yang masih perlu dibenahi. Namun disisi lain sector jasa pariwisata sudah berbenah dan siap menghadapi pasar bebas ASEAN hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kunjungan wisatawan asing yang datang ke Indonesia dan sudah adanya sertifikasi SDM pariwisata sehingga tenaga kerja pariwisata sudah siap bersaing saat MEA diberlakukan.

Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri sebagai basis memperoleh keuntungan. Namun diperlukan kedisiplinan dari pihak pemerintah, terutama yang berkaitan dengan wacana persiapan menghadapi realisasi MEA ditahun 2015, yaitu dengan peningkatan pengawasan terhadap perkembangan implementasi system yang terdapat dalam Blue Print AEC.

Daftar Pustaka

- Djafar Zainuddin. 1996. *Teori Hubungan Internasional Memerlukan Paradigma Baru?*. Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya. Hal. 36
- Dominick Salvatore, *International Economics* (New Jersey: Prentice Hall- Gale, 1997), 321.
- Menuju ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015. Departemen Perdagangan Republik Indonesia, hal. 74-78
- ASEAN Economic Community Chartbook 2015
Jakarta : ASEAN Secretariat, April 2016.Pdf
- Dag Einar Thorsen And Amund Lie, *What is Neoliberalism?*, Department of Political Sciencew University of Oslo.<http://folk.uio.no/daget/what%20is%20NeoLiberalism%20Final.pdf>.
Diakses pada tanggal 22 Oktober 2016
- Jiangyu Wang, “*China,India and Regional Economic Integration in Asia: The Policy and Legal Dimensions,*” (“makalah”) in Singapore Year Book of International Law (National University of Singapore, June 2006),
http://www.icrier.org/pdf/28march/28March07Afternoonday1/Wang_v1_rev30Nov06-pdf.pdf